



Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Elnada Gefania Syahputri^{1*}, Fitra Rizal²

¹ UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, elnadagefani@gmail.com

² UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, rizal@uinponorogo.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 5, 2025

Revised June 2, 2026

Accepted June 3, 2026

Available online June 8, 2026

*Corresponding author email:

elnadagefani@gmail.com

Keywords:

Fisheries Service; Fishermen Empowerment; Fishermen Welfare

Abstract

The Fisheries Service plays an important role in improving the welfare of fishing communities through various empowerment programs. This study aims to analyze the role of the Fisheries Service of Pacitan Regency in empowering fishermen and its implications for their economic welfare in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, Pacitan Regency. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving Fisheries Service officials and members of the fishing community. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that fishermen's empowerment has been implemented through four governmental roles: regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. These roles are reflected in policy support, business assistance, infrastructure development, and capacity-building programs. The success of these initiatives is supported by the strong work ethic of fishermen and the existence of fishermen's business groups. However, the program faces challenges, including limited human resource capacity and budget constraints. Furthermore, the empowerment initiatives have contributed to improving fishermen's welfare, particularly in education (hifz al-nasl), health and living standards (hifz al-nafs), and economic resilience through stable income and effective asset management (hifz al-mal).

DOI: [10.21154/niqosiya.v6i1.5503](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v6i1.5503)

Page: 111-121

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Peran merupakan seperangkat tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang melekat pada seseorang atau suatu lembaga dalam menjalankan kewajibannya di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peran merujuk pada tanggung jawab Dinas Perikanan dan Kelautan dalam membina kelompok nelayan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai program, seperti pelatihan, bantuan permodalan, serta pembinaan dalam pengolahan hasil tangkapan perikanan (Soekanto & Sulistyowati, 2013). Keberhasilan pelaksanaan peran tersebut menjadi penting karena sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang menopang kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan sumber pendapatannya pada hasil tangkapan laut.

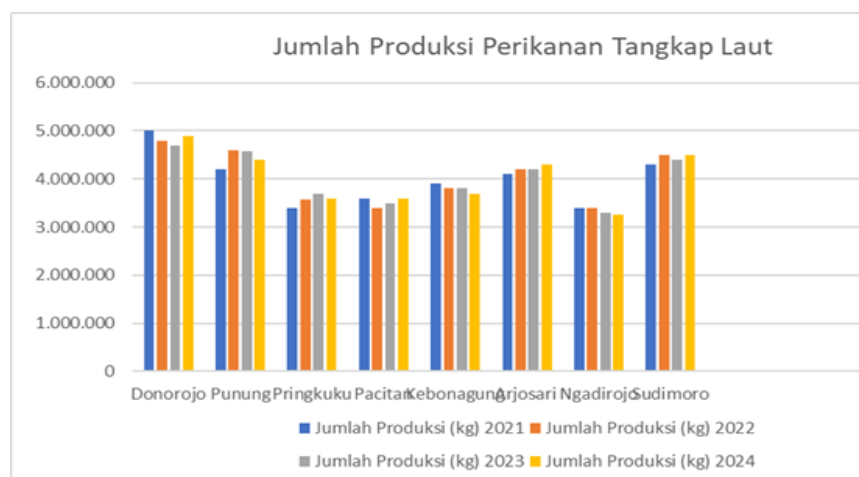
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinisiatif melakukan tindakan sosial guna memperbaiki kondisi dan kualitas hidup mereka secara mandiri (Christenson & Robinson, 1989). Oleh karena itu, pemberdayaan memiliki makna sebagai proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok masyarakat yang lemah agar mampu mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2005). Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan aktivitas ekonomi, serta optimalisasi permintaan dan penawaran yang mendorong peningkatan produksi dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi rumah tangga sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh (Rizal & Mukaromah, 2021). Lebih lanjut, keberhasilan program pemberdayaan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain meningkatnya kesejahteraan keluarga, bertambahnya pendapatan dan berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, tumbuhnya kemandirian kelompok masyarakat, serta meningkatnya pemerataan pendapatan dan kapasitas masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Masyarakat pesisir pada umumnya masih termasuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Ketergantungan terhadap kondisi alam dan musim menyebabkan pendapatan nelayan cenderung tidak menentu, sehingga tingkat kesejahteraan mereka relatif lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat produktif lainnya. Selain menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan, nelayan juga dihadapkan pada berbagai persoalan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan, lemahnya sistem pemasaran hasil tangkapan, serta keterbatasan penguasaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan (Paranto & Al-Barry, 2001). Berbagai permasalahan tersebut menjadi faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan

nelayan dan memperkuat posisi mereka sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan wilayah pesisir. Pemberdayaan nelayan diperlukan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap sumber daya produktif, penguatan kelembagaan nelayan, serta perluasan akses pasar. Nelayan skala kecil menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, serta lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran hasil tangkapan. Akibatnya, tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat nelayan agar tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Pacitan

Gambar 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut

Berdasarkan data pada gambar di atas, jumlah produksi perikanan tangkap di Kecamatan Ngadirojo mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi tersebut berimplikasi pada berkurangnya pendapatan nelayan yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan tangkap. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan. Di sisi lain, kawasan Pantai Tawang di Desa Sidomulyo memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam

mengembangkan potensi ekonomi kawasan pesisir melalui berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Fenomena yang terjadi di Pantai Tawang Desa Sidomulyo menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah. Sebagian besar nelayan merupakan nelayan perahu kecil dengan keterbatasan modal, sarana produksi, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Selain itu, masih ditemukan rendahnya pengetahuan nelayan mengenai keselamatan kerja di laut, perawatan mesin perahu, serta pengelolaan hasil tangkapan yang bernilai tambah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Dinas Perikanan tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pendamping dalam meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan secara berkelanjutan dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan dari berbagai perspektif. Windasai dan Said (2021) menemukan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas masyarakat pesisir. Penelitian lain menunjukkan bahwa program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Sementara itu, berbagai studi mengenai kesejahteraan nelayan umumnya berfokus pada aspek peningkatan pendapatan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan nelayan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan kebijakan, pendampingan, serta akses terhadap sumber daya produktif.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti efektivitas program pemberdayaan atau peningkatan pendapatan nelayan, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis peran Dinas Perikanan sebagai aktor utama pemberdayaan ekonomi nelayan di Kabupaten Pacitan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pemberdayaan nelayan umumnya menggunakan pendekatan kesejahteraan ekonomi konvensional dan belum banyak mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menganalisis peran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan ekonomi nelayan serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini didasarkan pada teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa individu atau lembaga bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya dalam masyarakat. Teori ini menekankan bagaimana suatu pihak memahami dan memenuhi harapan yang diberikan oleh lingkungan sosial sesuai dengan peran yang dijalankannya (Windasai & Said, 2021). Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perikanan dipandang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab

untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan melalui berbagai program dan kebijakan yang relevan.

Selain itu, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis melalui teori fungsi pemerintah yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwijowijoto, yaitu pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, inovator, dan katalisator dalam pembangunan masyarakat (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006). Sejalan dengan itu, konsep pemberdayaan masyarakat menurut Harry Hikmat menekankan pentingnya memaksimalkan potensi, gagasan, dan kemampuan masyarakat agar mampu keluar dari berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Melalui perspektif tersebut, pemberdayaan ekonomi nelayan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan penelitian, dan landasan teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan serta mengkaji implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alamiah (Moleong, 2007). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai peran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga September 2025 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri atas 1 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 1 Kepala Bidang/Kepala Seksi Dinas Perikanan, 1 Penyuluh Perikanan, 2 Ketua Kelompok Nelayan, dan 4 anggota kelompok nelayan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap informan penelitian yang terlibat dalam program pemberdayaan nelayan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, data statistik perikanan, laporan kegiatan, foto dokumentasi, buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, dan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi

sosial ekonomi masyarakat nelayan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait peran Dinas Perikanan, bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun seluruh informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi keadulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. Adapun peran pemerintah menurut Dwijowijoto dan Wrihatnolo dalam mengoptimalkan dan membangun masyarakat yang sejahtera antara lain: pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai inovator, dan pemerintah sebagai katalisator (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Dinas Perikanan sebagai regulator ini sama dengan teori yang diungkapkan oleh Dwijowijoto dan Wrihatnolo tentang fungsi peran pemerintah. Peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan-peraturan, maka penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan memiliki program pemberdayaan berupa penertiban katu Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Dimana program KUSUKA ini adalah peraturan

menteri maka Dinas Perikanan hanya mendorong masyarakat nelayan untuk mendaftarkan diri mereka dengan fungsi sebagai perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan gar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Serta program untuk perlindungan nelayan maupun keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN). BPAN yang dimaksud adalah untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Peran Dinas Perikanan sebagai dinamisator ini sama dengan teori yang diungkapkan oleh Dwijowijoto dan Wrihatnolo tentang fungsi peran pemerintah. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif yang diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu memberikan pelatihan (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

Pemerintah Dinas Perikanan telah melaksanakan penyuluhan maupun pelatihan secara rutin yang di adakan di setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan. Akan tetapi, pelatihan yang diadakan bersifat perwakilan jadi tidak semua masyarakat merasakan dampak dari penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perikanan. Seperti pelatihan produk olahan ikan tuna yang merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Pacitan dengan harapan mampu membantu perekonomian masyarakat nelayan.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, serta pendanaan atau permodalan (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan telah memberikan pendamping lapangan di setiap kecamatan yang terdapat TPI nya, khususnya untuk Desa Sidomulyo telah diberikan PPL yang bertugas mengawasi segala kegiatan nelayan dan produksi nelayan. Untuk bantuan pendanaan modal menurut hasil wawancara juga belum mendapatkan bantuan permodalan dari Dinas Perikanan.

4. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan seperti pada program percepatan pembangunan. Program pembangunan harus sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berada di suatu wilayah termasuk di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan maksud agar program yang direalisasikan oleh pemerintah tersebut dengan tujuan yang diinginkan dan tepat sasaran (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan telah melakukan program rehab sarana dan prasarana yang berada di TPI Sidomulyo seperti rehab pendaratan kapal dan perbaikan jalan menuju TPI. Tentu saja dengan adanya rehab yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sangat membantu para nelayan dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan.

Analisis Potensi dan Hambatan Dinas Perikanan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan oleh Dinas Perikanan di Desa Sidomulyo, Ngadirojo, Pacitan

1. Potensi Pemberdayaan Masyarakat

a. Semangat kerja tinggi

Potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di tandai dengan tingginya semangat kerjayang dimiliki oleh para nelayan di Desa Sidomulyo. Peningkatan kesejahteraan nelayan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hikmat dalam strategi pemberdayaan masyarakat, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam proses pemberdayaan. Peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat sangat penting karena bagaimanapun masyarakat bisa sejahtera ketika pemerintah mampu melaksanakan tugasnya dalam mengayomi masyarakat (Hikmat, 2001).

b. Pengembangan ekonomi lokal melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Potensi pengembangan ekonomi lokal masyarakat nelayan Desa Sidomulyo dapat dilihat dari beberapa kelompok nelayan yang berpotensi diadakannya KUB, dengan adanya KUB ini bisa menunjang pendapatan bagi nelayan. Pengembangan potensi ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan nelayan yang didapatkan oleh hasil kreatifitas nelayan dari bahan olahan tangkap ikan yang mana ilmu tersebut didapatkan dari penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Pengembangan ekonomi lokal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hikmat dalam strategi pemberdayaan masyarakat (Hikmat, 2001).

2. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat

a. Rendahnya kualitas SDM

Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), jika sumber dayanya baik maka pengelolaan hasil lautnya juga berjalan optimal. Namun hampir sebagian besar para nelayan berpendidikan sampai tingkat SD atau SMP, kondisi ini mengakibatkan sumber daya manusia rendah mengakibatkan daya tangkap pemahaman yang rendah sehingga penyuluhan tidak maksimal. Dinas Perikanan mengadakan sosialisasi yang rutin dilaksanakan dan juga pembinaan KUB dengan harapan dapat meningkatkan SDM para nelayan dan mengajarkan kepada nelayan bagaimana mengelola sumber daya laut dengan baik dan benar sehingga

dapat diambil manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayannya itu sendiri. Hambatan mengenai rendahnya SDM sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hikmat dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Rendahnya kualitas SDM ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor minimnya tingkat pendidikan seseorang, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya (Hikmat, 2001).

b. Keterbatasan anggaran

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan memiliki anggaran sebesar dua miliar rupiah yang disalurkan dari dinas pusat dalam waktu yang tidak menentu. Namun jumlah yang diterima kurang dari dua miliar rupiah. Hal ini terbukti dari beberapa kegiatan seperti penyuluhan peningkatan kapasitas nelayan dan perawatan sarana prasarana TPI yang tidak terlaksana secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada nelayan, terutama ketika mereka tidak bisa melaut akibat kondisi cuaca begitu juga dengan pendapatan mereka akan menurun. Hambatan mengenai keterbatasan anggaran ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hikmat dalam strategi pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat disebabkan oleh kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya (Hikmat, 2001).

Analisis Implikasi Pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Desa Sidomulyo, Ngadirojo, Pacitan.

1. Perbaikan Kualitas Pendidikan

Kontribusi perikanan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan keluarga, seperti kebutuhan pendidikan keturunan para nelayan yang terjamin sampai jenjang perguruan tinggi (Fauzia & Riyadi, 2014). implikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam, dilihat dari nelayan di desa Sidomulyo yang sudah bisa memperbaiki taraf hidup keluarganya dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (S1). Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih luas, khususnya dalam bidang pendidikan (Fauzia & Riyadi, 2014).

2. Kualitas Kesehatan Terjamin

Dinas Perikanan telah memberikan beberapa fasilitas dan pengadaan pelatihan kepada para nelayan untuk meningkatkan penghasilan mereka sehingga dengan adanya bantuan ini kesehatan nelayan terjamin karena nelayan memiliki pendapatan yang cukup untuk menjaga kesehatan keluarganya. Pada implikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ini sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam, sebagian nelayan yang sudah bisa menjaga kesehatannya dan

keturunannya dengan bertanggung jawab mencukupi kebutuhan kesehatan keluarga. Kebutuhan sandang pangan juga telah terpenuhi sehingga anak-anak mereka tumbuh sehat dan terhindar dari stunting (Fauzia & Riyadi, 2014).

3. Perbaikan Kualitas Ekonomi

Kontribusi Dinas Perikanan sudah memenuhi indikator kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam, yaitu menjaga harta yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi keluarga nelayan. Dari hasil wawancara dengan nelayan mengatakan bahwa dalam rangka untuk meraih kebahagiaan hidup maka terdapat upaya yang paling dasar yaitu dapat mendorong agar terjadinya kesejahteraan di setiap individu dan keluarganya. Islam juga mengajarkan bahwa tujuan bekerja adalah untuk mencari Rahmat Allah SWT dan juga untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan sehingga seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dan menikmati kesejahteraan hidupnya.

Pada implikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dilihat dari sebagian nelayan yang mampu mengelola hartanya dengan bijak yaitu memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta menyalurkan sebagian rezekinya melalui sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan seperti meningkatnya pendapatan harian, bertambahnya tabungan, dan berkembangnya usaha perikanan skala kecil (Fauzia & Riyadi, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sidomulyo melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui perlindungan usaha nelayan, pemberian bantuan sarana perikanan, peningkatan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat nelayan. Program pemberdayaan tersebut didukung oleh tingginya etos kerja nelayan dan keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai sarana pengembangan ekonomi lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia nelayan serta keterbatasan dan ketidaktepatan penyaluran anggaran yang memengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan.

Dari perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perikanan telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan yang tercermin pada aspek pendidikan (*hifz al-nasl*), kesehatan dan kualitas hidup (*hifz al-nafs*), serta penguatan ekonomi melalui stabilitas pendapatan dan pengelolaan aset yang lebih baik (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan perlu memperkuat program peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, memperluas pendampingan usaha berbasis kelompok, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna

menjamin keberlanjutan program dan optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan.

REFERENSI

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. (2025). Kabupaten Pacitan dalam angka 2025. BPS Pacitan.
- Christenson, J. A., & Robinson, J. W. (1989). *Community development in perspective*. Iowa State University Press.
- Cinner, J. E., et al. (2012). Comanagement of coral reef social-ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(14), 5219–5222.
- Food and Agriculture Organization. (2022). The state of world fisheries and aquaculture 2022. FAO. <https://www.fao.org>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syari'ah*. Kencana.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia*. KKP RI.
- Kusnadi. (2010). *Nelayan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial*. LKiS.
- Macusi, E. D., et al. (2022). Climate change impacts on small-scale fisheries livelihoods. *Frontiers in Marine Science*, 9, 1–12.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Z. (2018). Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kelembagaan lokal. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 101–112.
- Paranto, P. A., & Al-Barry, M. D. (2001). *Kamus ilmiah populer*. Arkola.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam solusi atas masalah kemiskinan akibat pandemi COVID-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 39–?.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Windasari, R., & Said, M. M. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan (studi kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3).
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia*. Elex Media Komputindo.